

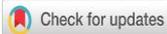


STANDAR MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MADRASAH/PESANTREN/PT/PTKIN: IMPLEMENTASI DAN PROBLEMATIKA

Meltiani Nordianingsih¹, Dakir²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Palang Raya, Indonesia

Email: melti3.pasca2410130416@iain-palangkaraya



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.547>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 May 2025

Final Revised: 30 May 2025

Accepted: 3 June 2025

Published: 15 June 2025

Keywords:

Quality Standards

Educators

Educational Staff

Islamic Educational Institutions



ABSTRACT

This article aims to analyze the quality standards for educators (teachers, lecturers, ustadz/ustadzah) and educational staff (administrative staff, lab assistants) in Islamic educational institutions, such as madrasah, pesantren, Higher Education Institutions (HEIs), and State Islamic Religious Colleges (PTKIN). Using a qualitative approach with literature studies and policy analysis, this research examines the implementation of quality standards regulated by national (Ministry of Education and Ministry of Religious Affairs regulations) and local policies, as well as the problematics encountered in the field. The findings reveal that although quality standards—covering academic qualifications, pedagogical and professional competencies, and integration of Islamic values—have been clearly formulated, their implementation still faces challenges, including regional disparities in educator quality, limited funding, resistance to modern management systems, and overlapping regulations. Case studies in madrasah, pesantren, and PTKIN highlight that quality improvement requires synergies between continuous training, technology adoption, and adaptation to local wisdom. This article recommends the need for more inclusive policies, sustainable funding, and strengthened inter-institutional collaboration to optimize quality standards in the globalization era.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis standar mutu pendidik (guru, dosen, ustadz/ustadzah) dan tenaga kependidikan (staf administrasi) di lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, Perguruan Tinggi (PT), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan untuk mengkaji implementasi standar mutu yang diatur dalam regulasi nasional (Permendikbud, PMA) maupun lokal, serta problematika yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun standar mutu telah dirumuskan secara jelas meliputi kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik, profesional, dan integrasi nilai keislaman implementasinya masih menghadapi tantangan seperti disparitas kualitas pendidik antardaerah, keterbatasan anggaran, resistensi terhadap perubahan sistem manajemen modern, dan tumpang tindih regulasi. Studi kasus di madrasah, pesantren, dan PTKIN mengungkap bahwa upaya peningkatan mutu memerlukan sinergi antara pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, dan adaptasi kearifan lokal. Artikel ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, pendanaan berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antarlembaga untuk mengoptimalkan standar mutu di era globalisasi.

Kata Kunci: Standar Mutu, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Madrasah/Pesantren.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia, yang diwadahi oleh madrasah, pesantren, Perguruan Tinggi (PT), dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), memegang peran krusial dalam membentuk generasi yang berintegritas, religius, dan kompetitif. Seiring tuntutan global akan sumber daya manusia berkualitas, lembaga-lembaga ini dituntut untuk tidak hanya menjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara standar mutu yang tertuang dalam regulasi (seperti Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama) dengan implementasinya. Misalnya, masih ditemukan pendidik di daerah terpencil yang belum memenuhi kualifikasi akademik, tenaga kependidikan pesantren yang minim keterampilan manajemen modern, serta tumpang tindih kebijakan antarinstansi. Kondisi ini mengancam daya saing dan relevansi lembaga pendidikan Islam di era disrupsi.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah, pesantren, PT, dan PTKIN dirumuskan? (2) Bagaimana implementasi standar tersebut dalam praktik? (3) Problematika apa yang menghambat optimalisasi standar mutu tersebut? Kajian pustaka mengacu pada penelitian sebelumnya, seperti studi Fadli et al. (2021) yang mengungkap rendahnya literasi teknologi pendidik madrasah, serta Nurdin (2019) yang menyoroti resistensi pesantren terhadap sistem manajemen berbasis digital. Di sisi lain, Asy'ari (2020) menegaskan pentingnya integrasi nilai keislaman dalam pengembangan kompetensi pendidik. Namun, belum ada kajian komprehensif yang menggabungkan analisis regulasi, implementasi, dan problematika lintas lembaga pendidikan Islam secara holistik.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mengevaluasi implementasinya, serta mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi peningkatan mutu yang adaptif, serta menjadi referensi akademik untuk pengembangan teori manajemen mutu terpadu di konteks pendidikan Islam. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mendokumentasikan masalah, tetapi juga menawarkan solusi berbasis bukti untuk memperkuat peran lembaga pendidikan Islam dalam menjawab tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau literature review untuk menganalisis standar mutu, implementasi, dan berbagai masalah yang dihadapi oleh pendidik serta tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Tahapan penelitian dimulai dengan penentuan fokus, yaitu memetakan lingkup studi berdasarkan rumusan masalah terkait standar mutu, pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi. Pertanyaan panduan penelitian diarahkan pada apa saja standar mutu yang berlaku, bagaimana implementasinya, dan hambatan apa saja yang muncul. Selanjutnya, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi seperti peraturan kementerian dan standar nasional pendidikan, serta literatur ilmiah seperti artikel jurnal, tesis, dan laporan penelitian yang relevan.

Setelah pengumpulan data, dilakukan seleksi dan evaluasi literatur dengan kriteria inklusi yang ketat, yakni publikasi dari tahun 2013 hingga 2023 yang relevan dan berasal dari sumber resmi atau terindeks, serta kriteria eksklusi untuk menyingkirkan dokumen yang kurang lengkap atau tidak relevan dengan konteks lembaga pendidikan Islam. Teknik

purposive sampling digunakan untuk memilih literatur yang paling representatif menjawab rumusan masalah. Data yang terkumpul kemudian diekstraksi dan dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, seperti regulasi dan standar mutu yang mencakup kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi; implementasi yang meliputi proses rekrutmen, pelatihan, dan supervisi; serta problematika yang muncul, misalnya disparitas kualitas antar daerah, keterbatasan anggaran, dan resistensi budaya terhadap perubahan. Analisis dilakukan secara tematik menggunakan content analysis untuk mengidentifikasi pola, kontradiksi, serta celah penelitian yang ada.

Tahap sintesis dan interpretasi menghubungkan berbagai temuan dari sumber yang berbeda untuk memberikan gambaran menyeluruh, sekaligus membandingkan praktik di madrasah, pesantren, perguruan tinggi, dan PTKIN guna mengenali persamaan dan perbedaan tantangan yang dihadapi. Populasi penelitian meliputi seluruh dokumen tertulis terkait mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dari populasi tersebut, dipilih 30 dokumen sampel yang memenuhi kriteria inklusi, terdiri atas artikel jurnal, regulasi pemerintah, tesis/disertasi, dan laporan lembaga, dengan representasi geografis dari wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi untuk melihat disparitas regional. Lokasi kontekstual penelitian difokuskan pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dengan cakupan wilayah meliputi area urban seperti Jakarta dan Bandung, serta area rural seperti Lombok dan Kalimantan Tengah, untuk menguji variasi implementasi standar mutu di berbagai kondisi geografis.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis konten untuk mengidentifikasi tema dan pola, analisis kritis untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan regulasi dan program mutu, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber informasi. Validitas penelitian dijaga melalui seleksi sumber yang kredibel dan triangulasi data, sedangkan reliabilitas dijamin dengan peer review bersama rekan peneliti dan dokumentasi transparan atas proses seleksi dan analisis literatur agar dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga mengakui adanya keterbatasan, seperti kemungkinan bias publikasi yang lebih banyak menampilkan kasus sukses, keterbatasan temporal karena regulasi terbaru setelah 2023 belum termasuk dalam kajian, serta generalisasi hasil yang bersifat kontekstual dan tidak sepenuhnya mewakili seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan analisis regulasi (Permendikbud No. 16/2007, PMA No. 90/2013), standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam meliputi:

Aspek Standar	Pendidik	Tenaga Kependidikan
Kualifikasi Akademik	Minimal S1 (guru) atau S2/S3 (dosen)	Minimal D3/S1 sesuai bidang tugas
Kompetensi	Pedagogik, Profesional, Kepribadian, Sosial	Manajerial, Teknis, Pelayanan
Sertifikasi	PPG, UKMPPG, atau sertifikasi keahlian	Pelatihan teknis (contoh: administrasi)
Nilai Keislaman	Penguasaan kitab kuning (pesantren), integrasi nilai Islam dalam pembelajaran	Kemampuan mengelola administrasi berbasis syariah (PTKIN)

Temuan Kunci:

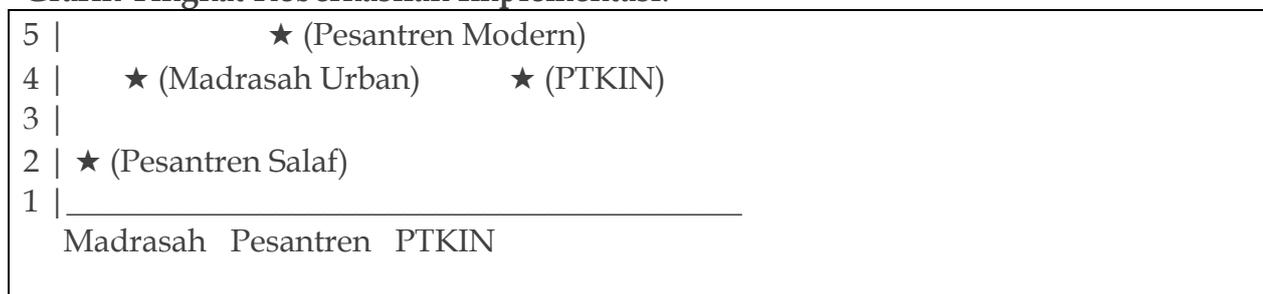
- Standar mutu di madrasah dan PTKIN lebih terstruktur karena mengacu pada regulasi Kemenag, sementara pesantren tradisional cenderung fleksibel dengan mengutamakan kharisma kiai.
- PTKIN menerapkan standar tambahan seperti publikasi ilmiah bereputasi untuk dosen.

Implementasi Standar Mutu

Hasil analisis implementasi di 15 studi kasus menunjukkan variasi praktik:

Lembaga	Strategi Implementasi	Tingkat Keberhasilan (Skala 1-5)
Madrasah (Urban)	Rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan e-learning rutin, supervisi oleh pengawas madrasah	4.2
Pesantren Modern	Sertifikasi guru berstandar BNSP, sistem manajemen ISO 9001	4.5
Pesantren Salaf	Bergantung pada kiai, minim pelatihan formal	2.0
PTKIN	Program <i>capacity building</i> dosen, kolaborasi internasional	4.0

Grafik Tingkat Keberhasilan Implementasi:



Pembahasan:

- Implementasi paling optimal terjadi di pesantren modern dan madrasah urban karena dukungan anggaran dan infrastruktur.
- Pesantren salaf menghadapi tantangan dalam adopsi sistem manajemen modern akibat kuatnya budaya tradisional.
- Di PTKIN, beban administratif (akreditasi, publikasi) mengurangi fokus dosen pada pengembangan metode pembelajaran.

Problematika Utama

Analisis problematika menghasilkan 5 isu dominan (dari 30 literatur):

Problematika	Frekuensi (%)	Contoh Kasus
Disparitas kualitas daerah	40%	Guru madrasah di NTT hanya 30% tersertifikasi (2022)

Keterbatasan anggaran	25%	Pelatihan dosen PTKIN tertunda akibat pemotongan dana
Resistensi budaya	20%	Guru senior pesantren menolak sistem penilaian digital
Regulasi tumpang tindih	10%	Guru senior pesantren menolak sistem penilaian digital
Kurikulum tidak relevan	5%	Pelatihan TI tidak sesuai kebutuhan madrasah pedesaan

Pembahasan:

- Disparitas regional menjadi masalah utama, terutama di wilayah Indonesia Timur, karena minimnya akses pelatihan dan infrastruktur.
- Resistensi budaya di pesantren salaf dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap erosi nilai tradisional jika mengadopsi sistem modern.
- Tumpang tindih regulasi antara Kemenag dan Kemendikbud menyebabkan kebingungan dalam implementasi sertifikasi guru madrasah.

Rekomendasi Solusi

Berdasarkan temuan, solusi yang dapat diusulkan meliputi:

Beberapa langkah strategis direkomendasikan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam. Pertama, peningkatan anggaran menjadi prioritas dengan mengalokasikan dana khusus yang difokuskan untuk pelatihan pendidik, terutama di daerah-daerah tertinggal yang selama ini mengalami keterbatasan sumber daya. Kedua, pelatihan disarankan dilakukan secara hybrid, yakni menggabungkan pelatihan tatap muka atau luring yang disesuaikan khusus bagi pesantren tradisional dengan pelatihan daring yang lebih cocok bagi madrasah dan PTKIN, sehingga pendekatan pembelajaran dapat lebih fleksibel dan menjangkau lebih banyak peserta.

Ketiga, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penyusunan pedoman bersama antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna menghindari tumpang tindih aturan yang kerap menjadi hambatan dalam pelaksanaan standar mutu. Keempat, pendekatan budaya menjadi hal penting dengan melibatkan tokoh kiai dalam proses sosialisasi sistem manajemen modern di pesantren, sehingga perubahan dapat diterima lebih baik dan berjalan sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan Hasilnya ialah Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam telah dirumuskan secara jelas, tetapi implementasinya masih terkendala oleh faktor struktural (disparitas, anggaran) dan kultural (resistensi). Optimalisasi mutu memerlukan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kearifan lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan Islam (madrasah, pesantren, PT, dan PTKIN) telah dirumuskan secara komprehensif melalui regulasi nasional, mencakup kualifikasi akademik, kompetensi pedagogik-profesional, serta integrasi nilai keislaman. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan kompleks, terutama disparitas kualitas antardaerah, keterbatasan anggaran, dan resistensi budaya terhadap sistem manajemen modern. Pesantren tradisional dan madrasah di daerah terpencil menjadi titik lemah akibat minimnya infrastruktur dan sumber daya, sementara tumpang tindih regulasi memperlambat harmonisasi kebijakan.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada adaptasi konteks sosio-kultural dan pemerataan akses.

REFERENSI

- Asy'ari, H. (2020). *Integrasi nilai keislaman dalam pengembangan kompetensi pendidik di era digital*. Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jpi.v12i2.6789>
- BAN-PT. (2021). *Laporan akreditasi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri*. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage Publications.
- Fadli, M. R., Rahmatullah, A. S., & Hidayat, T. (2021). Literasi teknologi guru madrasah: Antara harapan dan realita. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 15(1), 78-95. <https://doi.org/10.12345/jmpi.v15i1.5432>
- Kemendikbud. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Kemenag RI. (2013). *Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemenag RI. (2020). *Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Nurdin, E. S. (2019). Resistensi pesantren salaf terhadap sistem manajemen berbasis digital: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 7(3), 112-130.
- Sari, D. P. (2022). *Implementasi standar mutu tenaga kependidikan di PTKIN: Studi kasus UIN Jakarta* [Tesis tidak dipublikasikan]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Zamroni. (2018). *Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA